

working papers

LABORATORIUM SOSIOLOGI FISIP
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Jalan Babarsari no 6 Yogyakarta 55281 Indonesia
Kotak Pos 1086 Tlp. +62-274-487711 ext.4420 Fax. +62-274-487748
Website: <http://fisip.uajy.ac.id/labsos> E-mail : kalab_sos@mail.uajy.ac.id



working papers

LABORATORIUM SOSIOLOGI
FISIP UNIVERSITAS ATMA JAYA
YOGYAKARTA

Volume 6 Nomor 1, Maret 2016
ISSN : 1907-5979

Politik Sehari-hari Massa Pinggiran **Hersumpana**

Jalan Babarsari no 6 Yogyakarta 55281 Indonesia
Kotak Pos 1086 Tlp. +62-274-487711 ext 4420 Fax. +62-274-487748
Website : <http://fisip.uajy.ac.id/labsos> E-mail : kalab_sos@mail.uajy.ac.id

KATA PENGANTAR

Studi atau kajian serta publikasi tentang siasat politik sehari-hari komunitas pinggiran dalam kantung kemiskinan kota selalu menjadi tema studi spesifik, unik dan menarik dalam kajian ilmu sosial humaniora. Selain itu studi tentang transformasi komunitas di tengah perkembangan kota juga merupakan sub tema kajian ilmu sosial dan humaniora yang juga menarik untuk ditekuni. Sebagai bagian dari studi ilmu sosial tentang perkembangan kota serta sebagai bagian luas dari kajian peradaban dan kebudayaan maka tema di atas dirasa perlu dipublikasikan dalam sebuah media yang sederhana.

Gagasan tentang *Komunitas Bong Suwung* sebagai kelompok marginal perkotaan dalam tulisan ini merupakan kekuatan yang layak untuk disimak sebagai bagian dari kemunculan teoritasi dari abstraksi realitas di dalam kehidupan masyarakat perkotaan khususnya di Yogyakarta. Secara sosial ekonomi gagasan tentang *Bong Suwung* dalam tulisan ini dimaksud oleh penulis sebagai bangunan konkret model abstraksi pola sosial untuk membangun sebuah pola relasi antar anggota komunitas yang saling terkait satu dengan lain. Upaya lain dari tulisan ini adalah juga mencoba membaca sebuah tatatan ekonomi bawah tanah „illegal“ yang didukung oleh kelompok kekuatan non pemerintah dengan membentuk sebuah aliansi kuat yang bisa disebut sebagai *enthrenced illegality* dalam struktur dan sistem sosial kota khususnya Kota Yogyakarta.

Selanjutnya, tulisan ini mencoba banyak memetakan tentang pola relasi dan strategi sosial yang dikonseptualisasi

antara konsep bong suwung, tempat lokalisasi dan premanisme di Kota Yogyakarta. Permasalahan keseharian dalam tulisan ini yang senantiasa dihadapi oleh mereka dari waktu ke waktu bersifat klasik berjalan seiring waktu dan senantiasa menghadapi kekuasaan struktural yang terus mencoba menggusur mereka, baik dari lokasi maupun cara hidup menjadi gagasan akhir penting dalam tulisan ini. Harapan redaksi semoga publikasi dari karya ini dapat menginspirasi dan memotivasi riset-riset lain susulan yang mencoba memetakan permasalahan sosial dan strategi sosial perkotaan sebagai karya karya akademis sosial dan humaniora menarik yang akan mewarnai dunia akademis.

Yogyakarta, Maret 2016

Pimpinan Redaksi *Working Paper*
Program Studi Sosiologi
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

**Tentang
Laboratorium Sosiologi**

Laboratorium Sosiologi, Program studi Sosiologi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta didirikan pada tahun 1998. Letupan gagasan yang mendasarinya adalah kegiatan untuk menerapkan teori dalam wujudkerja-kerja praktikum penelitian.

Seiring dengan dinamika dan perkembangan aktivitas, Laboratorium sosiologi pun semakin menemukan posisi institusional dan focus kegiatan. Secara institusional, Laboratorium Sosiologi adalah organisasi di bawah program studi Sosiologi yaitu, proses belajar-mengajar, penelitian dan pengabdian. Penerjemahan dari pihak ketiga fungsi tersebut adalah kerja-kerja seperti pengumpulan data, praktikum penelitian, pembuatan film documenter, diskusi bulanan, seminar dan penerbitan. Secara khusus, sebagai bentuk pengaturan dan pendalaman akan aktivitas pengabdian, Laboratorium Sosiologi selalu mengedepankan kerja jejaring.

Dengan demikian, tak berlebihan kiranya jika keberadaan laboratorium sosiologi menjadi ujung tombak pengembangan sosiologi, baik ilmu maupun institusinya.

Volume 6 Nomor 1
Maret 2016
ISSN : 1907-5979

**WORKING PAPER
LABORATORIUM SOSIOLOGI**

Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Ketua :

St. Nindito

Dewan Redaksi :

Andreas A.Susanto

Bambang K. Prihandono

Y.Kunharibowo

Suryo Adi Pramono

V.Lucinda

V.Sundari Handoko

Desain Wajah :

Priyan Kristi Winarno (*Asisten Labsos*)

Layout :

Eka Yuliyanti (*Asisten Labsos*)

DAFTAR ISI

JUDUL	1
A. SIASAT EKONOMI	2
B. SIASAT POLITIK	
BONG SUWUNG	19
1.1 SIASATPENDUDUKAN	
BON(G) SUWUNG	19
1.2 SIASAT SEBAGAI	
KOMUNITAS	30
1.3 SIASAT POLITIK	
SEBAGAI KAMPUNG	44
1.4 KETIDAKHADIRAN	
NEGARA	56

DAFTAR GAMBAR

BAGAN 1	36
BAGAN 2	38
BAGAN 3	39

Politik Sehari-hari Massa Pinggiran

Perkembangan kota adalah sebuah peluang bagi peningkatan kesejahteraan. Akan tetapi bagi yang tidak bisa memanfaatkan peluang tersebut, baik pendatang maupun penduduk lokal menjadi kelompok „pinggiran“. Kelompok periferial tidak bisa masuk dalam sistem modernitas kehidupan kota. Kelompok pinggiran ini mempunyai cara untuk bertahan (*survived*). Komunitas Bong Suwung membangun siasat ekonomi dan politiknya sendiri dalam menghadapi modernitas kota yang di mata pemangku kekuasaan dipandang sebagai „kelompok pengganggu dan citra hitam kota“. Meskipun demikian, ada relasi antara kekuasaan yang terjalin secara tidak kasap mata antara penguasa dengan komunitas yang dipandang illegal. Fenomena *beking* merupakan bagian dari siasat yang berkembang dalam kehidupan seperti Bong Suwung yang diwakili oleh “oknum aparat militer” dengan kelompok

komunitas ilegal seperti yang digambarkan oleh Edward Aspinall dan Gerry Van

Klinken yang disebut dengan “*enthrenched illegality*”¹.

Bagian ini mendiskusikan lebih lanjut siasat politik sehari-hari komunitas Bong Suwung dan transformasi komunitas di tengah perkembangan kota Yogyakarta dalam hubungannya dengan kekuasaan negara.

A. Siasat Ekonomi

Komunitas Bong Suwung sebagai kelompok marginal perkotaan secara ekonomi membangun sebuah pola relasi antar anggota komunitas yang saling terkait satu dengan lain dan mengupayakan sebuah tatatan ekonomi bawah tanah „illegal” yang didukung oleh kelompok kekuatan non pemerintah dengan membentuk sebuah aliansi kuat yang bisa

¹ Edward Aspinall, Gerry Van Klinken, eds., *The State and Illegality in Indonesia* (Leiden: KITLV Press, 2011, *Verhandelingen van het Koninklijk Instituut Voor Taal-, Land-, en Volkenkunde* no. 269) hlm. 5

disebut sebagai *enthrenched illegality*. Aliansi kekuatan kelompok yang disebut „preman” dengan oknum penguasa pada masa Orde Baru semakin menemukan bentuk dalam berbagai jenis bisnis gelap seperti perjudian, prostitusi dan jasa keamanan pada usaha-usaha ekonomi informal yang tersebar di penjuru kota.

Faktor kemiskinan dan minimnya ketrampilan (*unskill*) untuk bersaing dengan angkatan kerja berijazah yang membentuk komunitas Bong Suwung memilih

“pekerjaan yang berisiko tinggi” sebagai bagian dari strategi subsistensi untuk keberlangsungan hidup mereka. Alasan ini yang selalu menjadi pegangan ketika ada gerakan-gerakan untuk merelokasi atau menghapuskan „eksistensi mereka”. Meskipun demikian, sejarah membuktikan komunitas Bong Suwung tetap bertahan dengan strategi ekonomi yang tidak

lazim yang menurut Tajduddin lebih cocok disebut sebagai sumber kehidupan².

Strategi ekonomi sebagai sumber penghidupan Komunitas Bong Suwung terdapat 3 jenis sumber penghidupan utama, yakni menjual seks, dan perjudian, dan jasa keamanan atau preman. Untuk menjalankan usaha berisiko ini komunitas Bong Suwung membangun relasi dengan oknum petugas yang bertindak sebagai „*beking* keamanan“. Yang bertindak sebagai *beking* ini terdiri dari „keamanan sipil“ yang memiliki reputasi dan patron dari oknum angkatan/militer. Relasi kuasa diantara kedua kekuatan tersebut yang memberikan jaminan keamanan pada sektor ini.

Perubahan Interelasi antar kekuatan dan perkembangan ekonomi „bawah tanah“ di

² Tadjuddin Noer Effendi, *Masyarakat Hunian Liar di Kota*, Op. cit hlm19.

Bong Suwung, penulis menggambarkan melalui dua sosok gali dari masa berbeda.

Sosok gali pertama adalah Peno yang menjadi „ikon“ Bong Suwung pada 1970an – 1983 dan Sosok Gun Jack sebagai gali yang menjadi patron di Bong Suwung dan berbagai aktifitas ilegal di sekitarnya periode 1990an – 2011.

1. Peno (1970 -1983)³

Usaha yang dikembangkan oleh Peno adalah perjudian di Bong Suwung. Jenis perjudian sebagai mesin pencari uang adalah sejenis permainan yang dikenal sebagai „*cliwik* atau *oglok*“⁴. Permainan ini cukup populer bagi masyarakat di Jawa. Permainannya cukup sederhana dengan memasang uang pada selembat peralatan

³ Wawancara Heriyanto, 10 Januari 2014

⁴⁴ Permainan Dadu dikenal luas di Jawa pada tahun 1970 -1980an di setiap acara pertunjukkan wayang atau ketroprak di kampung-kampung, permainan ini tidak pernah absen meski harus kucing-kucingan dengan aparat kepolisian. Jika „tidak memberi „halep“ permainan dadu pasti digropyok dan dibubarkan. yang didesain sesuai dengan jenis dadunya. Permainan ini tidak memerlukan banyak pemikiran. Para pemain cukup memasang uang pada kolom yang dipercaya akan muncul angka tertentu. Permainan jenis ini cukup mudah dan dapat menghasilkan uang dalam waktu yang cepat sehingga cukup populer di tengah masyarakat. Di samping judi, pekerja seks dan warung –warung yang menyediakan makanan dan minuman merupakan bagian dari kehidupan Bong Suwung yang menghasilkan uang cepat. Menurut informasi dari salah satu pewartu yang masih menggantungkan hidupnya dari kehidupan di Bong Suwung, periode itu mencari uang sangat mudah. Keuntungan bisa mencapai seratus hingga tiga ratus persen untuk penjual minuman beralkohol sejenis jenever, vodka, *beer* dan berbagai minuman lain.

Kelompok preman ini tidak hanya mengandalkan usaha dalam sektor perjudian, prostitusi, tetapi juga mengembangkan usaha jasa penagihan (*debt collector*). Sebagian yang lain menjadi semacam satpam di berbagai kantor-kantor dan penjaga toko. Sehingga meski dalam keseharian tidak pernah bekerja dalam jenis pekerjaan seperti yang lain. Para preman ini dapat hidup dengan cukup layak dan memiliki tempat tinggal yang baik.

Mereka juga mendapatkan uang sejenis upeti sebagai „pengaman informal“ pada kawasan parkir atau tempat pedagang kaki lima. Periode ini Bong Suwung menjadi semacam “pasar malam” yang selalu ramai dengan pengunjung ketika matahari tenggelam dan lapak-lapak perjudian dibuka, warung-warung makanan dan minuman disertai dengan perempuan pekerja seks yang menanti „pelanggan“ di warung-warung atau di sekitar rel kereta api. Kejayaan Peno runtuh ketika dia masuk dalam *list* bunuh

pada masa OPK. Akan tetapi dengan adanya OPK apakah komunitas Bong suwung berhenti dan tutup. Ternyata tidak, geliat kehidupan Bong Suwung tidak banyak terpengaruh oleh peristiwa OPK, kecuali para gali yang melarikan diri mencari selamat dari penembak misterius antara 1982-1983 di kota Yogyakarta.

2. Gun Jack (1990an – 2011)

Sosok Gali ini berkiprah sejak 1990an. Gun Jack mulai diperhitungkan sejak membunuh seorang anggota TNI. Setelah keluar dari penjara, Gun Jack tumbuh menjadi sosok preman yang dikenal memiliki kecerdasan dalam membangun jaringan premanisme di Yogyakarta dan tidak hanya mengandalkan otot tetapi juga otak. Pendapatannya diperoleh

dari jasa-jasa pengamanan dan patronase yang diberikan kepada kelompok-kelompok gali lain di Kota Yogyakarta³.

Gun Jack menguasai jaringan usaha informal dan illegal di kota Yogyakarta seperti kawasan prostitusi Sarkem, pedagang kaki 5 Malioboro, kawasan prostitusi liar Bong Suwung dan beberapa tempat lain. Usaha Gun Jack sebagai „beking” berkembang dramatis sekitar tahun 2000-an. Gun Jack menikmati berbagai upeti yang diberikan oleh pengusaha Cina seperti Sumber Baru Motor yang memberikan uang keamanan rutin setiap bulan yang angkanya mencapai 14 juta rupiah.

Pendapatan Gun Jack terbesar adalah ketika bisnis perjudian masih marak di kawasan

³ Gun Jack Legenda Preman dari Kampung Badran, *Tempo.co* Sabtu, 20 April 2013, <http://www.tempo.co/read/news/2013/04/20/078474689/Gun-Jack-Legenda-Preman-dari-KampungBadran>, diakses pada 23 Juni 2014 pk1. 2:46

Bioskop Mataram. Setiap bulan Gun Jack menerima uang „upeti” sebesar 15 juta rupiah dan judi yang sangat populer, *togel*. Belum berbagai lahan parkir mulai dari jalan Solo, Jalan Magelang, Jalan Wates semua memberikan setoran ke Gun Jack⁴.

Reputasi Gun Jack sebagai preman cukup istimewa. Pengaruhnya konon menurut kesaksian mantan anak buahnya bahkan sampai bisa menentukan nasib seorang Kapolda. Buktinya, salah seorang Kapolres ada yang menjadi anak buahnya. Ketika Kapolres ini membuka tempat perjudian, dia menyetor ke Gun Jack. Perjudian menjadi salah satu tambang dari pundi-pundi Gun Jack sekaligus menjadi maskotnya. Siasat ekonomi yang dibangun Gun Jack dengan memanfaatkan ketokohnya mampu menghidupi kelompok

⁴ Wawancara, Sutris (32 tahun), 23 Juni 2014

banyak orang. Kurang lebih 100 orang yang menjadi petugas lapangan dikoordinir Gun Jack pada masa kejayaannya⁵.

3. Prostitusi dan Usaha Warung

Pekerja seks dibedakan ke dalam dua kelompok, pekerja seks warung dan pekerja seks jalanan. Pekerja seks warung adalah pekerja seks yang menjalankan usahanya di Warung. Pekerja seks menjalankan kegiatannya dengan berkedok sebagai pelayan. Sedangkan pekerja seks liar menjalankan operasinya di pinggir jalan dan rel kereta api. Kategori kelas pekerja seks warungan dan pekerja seks jalanan dapat dibedakan dengan imbalannya. Imbalan untuk pekerja seks warung lebih tinggi jika dibandingkan dengan imbalan yang diterima oleh pekerja seks jalanan. Pada tahun 1983, pekerja seks warung menerima imbalan jasa Rp. 3000,- per tamu, Sedangkan pekerja seks jalanan menerima imbalan

⁵ *Ibid.*

jasa Rp. 1500,- per tamu⁶. Selain itu, tempat untuk melayani tamu juga berbeda, pekerja seks liar melayani tamu di gubuk-gubuk liar yang terbuat dari bamboo (*gedheg*) yang berukuran 2X2, tanpa tempat tidur, tanpa lampu dan tanpa kamar mandi yang disewa dengan harga 100 rupiah sekali melayani tamu.

Pekerja seks warung melayani tamu di kamar-kamar yang disewakan dari pemilik warung. Harga sewa kamar berkisar antara Rp. 250 – Rp.500. Kamar dilengkapi dengan kasur, sprei, kamar mandi sewanya mencapai Rp. 500. Pekerja seks warung mendapatkan layanan kesehatan tiap 10 hari sekali. Pekerja seks warung dan pekerja seks liar mendapatkan layanan yang berbeda dalam layanan kesehatan dan keamanan. Jumlah pekerja seks warung waktu itu

⁶ *Ibid.*

ditengarai untuk pekerja seks liar mencapai 125 – 150 orang, sedangkan pekerja seks warung mencapai 150 – 200 orang⁷.

Pekerja seks baik yang di warung maupun yang di jalanan merupakan matarantai sumber penghidupan ekonomi informal lain, seperti jasa warung. Warung merupakan tempat bertemu antara pekerja seks dengan pelanggan juga, dan menyediakan kamar. Pemilik warung mendapatkan pendapat selain dari menjual makanan dan minuman, juga uang dari sewa kamar. Pengusaha warung di Bong Suwung sebanyak 38 orang. Kondisi kehidupan komunitas Bong Suwung dalam perjalanan waktu tidak banyak berubah, pada tahun 2013 jumlah pengusaha warung kurang lebih sama sekitar 30-an orang, dan pekerja seks sekitar 120 – 150 orang. Ada kecenderungan kehidupan Bong Suwung mengalami stagnasi. Disamping itu, penjelasan lain adalah sebagian pekerja seks yang sudah tua, menikah dan punya anak memilih profesi

⁷ *Ibid.*

yang berbeda. Ini banyak ditemui di Kampung Ledok Badran. Mereka menjadi bagian integral dari kampung⁸.

Kelompok lain yang mendapatkan sumber kehidupan dari ekonomi informal illegal ini adalah gali. Gali memainkan peran penting dalam sistem kehidupan bawah tanah ini. Gali berperan sebagai pemberi “perlindungan” dan “keamanan” bersama dengan pewartung dan pekerja seks gali membentuk semacam “organisasi” yang dipimpin oleh seorang gali yang memiliki “wibawa”. Organisasi gali ini mengatur kehidupan di kalangan mereka, juga berperan dalam melakukan hubungan dengan pihak eksternal terutama keamanan dari luar. Sudah bukan rahasia lagi bahwa antara gali dengan oknum-oknum keamanan saling menjalin hubungan dengan imbalan upeti dari sebagian uang yang didapatkan dari

⁸ Wawancara Pak Sariman, Ketua RT 48 RW 11 Ledok Badran, Oktober 2013.

ongkos keamanan dari anggota komunitas, baik pekerja seks, dan pewartung.

Sebagai cara bertahan ditengah kerasnya kehidupan kota tanpa ketrampilan cukup dan pendidikan rendah, menjadi Pekerja Seks adalah sebuah strategi ekonomi untuk mencari penghidupan sebagai pilihan. Meskipun demikian, para pekerja seks ini juga memiliki tata nilai sendiri yang tidak berbeda dengan tata nilai yang dianut oleh masyarakat umum.

“Tidak seorang pun yang bercita-cita akan menjadi pekerja seks. Tetapi karena faktor ekonomi atau alasan lain, orang akhirnya memilih menjadi pekerja seks. Tetapi mereka juga memiliki sopan santun dan tata nilai sebagai manusia. Maka kami sekarang istilahnya kita menggunakan PPS (Perempuan Pekerja Seks) bukan WTS (*Wanita Tuna Susila*) “. Kebanyakan orang masih memakai istilah wanita tuna susila, kalau tuna susila ini seolah-olah tidak punya tata nilai, padahal PS

juga manusia yang mempunyai sikap dan nilai-nilai seperti yang lain.”⁹

Terdapat banyak alasan lain yang kompleks sehingga membuat pekerjaan ini tidak pernah hilang begitu saja. Meski dari berbagai sudut pandang normalitas umum dianggap sebagai bukan pekerjaan, dan lebih parah lagi dalam kacamata penguasa dipandang sebagai “penyakit masyarakat” yang harus diberantas. Akan tetapi bagi komunitas Bong Suwung dan komunitas pinggiran lain “klaim-klaim” yang menganggap mereka sebagai kelompok yang dilihat sebelah mata, tidak lagi diperdulikan karena dalam dunia mereka kenyataan hidup keseharian lebih berbicara. Dalam menjalani kehidupan di zaman yang kapitalistik ini, jika orang tidak memiliki uang orang tidak punya harga diri. Ukuran kesalehan tidak berlaku, dalam benak mereka “uang tidak mempunyai agama”. Kondisi hidup yang semakin

⁹ Wawancara, Ketua ADS, Yayuk (59 tahun), seorang mantan PS yang sekarang membuka warung di bong Suwung, 18 November 2013.

kapitalistik dan komersial ini tidak pelak lagi turut membentuk “tata nilai “dalam masyarakat yang diukur dengan materi.

Seorang pemilik warung yang juga dikenal sebagai ketua kelompok pedagang dan pemilik warung sejak tahun 2000, memiliki persepsi terhadap keberadaan Ngebong sebagai bagian dari strategi ekonomi kelompok pinggiran mendapatkan penghidupan.

“ Bagi saya *Ngebong* merupakan tempat yang memiliki sejarah sekaligus sebagai tempat mencari kehidupan bagi cukup banyak orang setidaknya sekitar 30 pedagang dan 150 pekerja seks komersial yang bergantung hidup dari kehidupan malam di *Ngebong*. Permasalahannya bukan sekedar soal moral tetapi adalah sosial ekonomi. Jika sudah menyangkut periuk, maka akan tetap diperjuangkan”.

Pada sabtu, 1 Mei 2010, komunitas pedagang yang tinggal di daerah *Ngebong* mendapatkan surat dari PT KAI

DOP 6 Yogyakarta dengan nomer DVI/YK/326/IV/2010 perihal surat teguran tertanggal 30 April 2010. Surat tersebut merupakan teguran terhadap para penghuni yang akan dilakukan penertiban wilayah¹⁰.

Komunitas Bong Suwung melakukan koordinasi dengan berbagai pihak melibatkan „preman, PT. KAI, kepolisian, pemerintah setempat bahkan dengan ombudsman untuk diminta dukungan bagi keberadaan komunitas Bong Suwung.

Meski sesungguhnya rencana penggusuran ini sebenarnya menurut informan, sudah beberapa kali dilakukan oleh pihak PT. KAI, akan tetapi selalu tidak diindahkan oleh penduduk. Sebelumnya sekitar tahun 2007-2008, rencana penggusuran juga sudah dilakukan oleh PT.KAI dan terdapat kesepakatan

¹⁰ Dokumen kronologis atas rencana penertiban wilayah di Ngebong oleh PT. KAI, PKBI tahun 2010.

antara PT.KAI dan para penghuni, bahwa mereka masih diperbolehkan menempati Bong Suwung dengan sistem bongkar pasang.

B. Siasat Politik Bong Suwung

1. Siasat Pendudukan Bon(g) Suwung

Selama ini, konflik perkotaan, pergolakan kota, konflik antar etnik, pemogokan dan kerusuhan adalah ekspresi ketegangan yang melanda penduduk kota dan perjuangan mereka dalam menguasai sarana reproduksi – yakni, lahan di kota. Konsepsi hak milik penguasaan tanah sekaligus sebagai legitimasi konsesi eksploitasi atasnya, serta perspektif mengenai ruang hidup dan ruang berusaha, kini sudah begitu kompleks persoalannya. Belum lagi soal absennya negara, regulasi serta rencana tata ruang yang tidak pernah jelas, semakin menambah pelik dan spesifik setiap

persoalan di ruang kota. Dalam banyak hal, pendudukan dan perjuangan penguasaan lahan di kota seringkali didasari oleh anggapan makna-makna “kekosongan” atas lahan tersebut. Kekosongan yang sesungguhnya dijalankan sebagai kata kerja: pengosongan. Pengosongan dari bangunan, pengosongan dari aktivitas, pengosongan dari peraturan, pengosongan dari tuntutan, dan pengosongan dari potensi konflik. Lahan atau tanah kosong merupakan wacana elitis. Ia merupakan terminologi yang dihasilkan dari memandang ruang kota (modern) dari atas, berjarak dan sebagai tempat¹¹. Namun, meskipun begitu, bagi sebagian besar kaum urban, “kosong” juga berarti kesempatan, yaitu sebuah celah yang bisa dimasuki untuk hidup dan berusaha. Dalam hal ini, ruang

¹¹ Yoshie Fajar Kresno Murti, Lahan Kosong Wacana Elitis Pendudukan dan Eksploitasi Ruang Urban, *Makalah diskusi penelitian tentang Bon Suwung (kebun kosong) di IVAA*, 2012. Kajian dan Wacana mendalam tentang perebutan ruang ini dapat dilihat dalam disertasi S3, Purnawan Basundoro tentang Orang Miskin dan Perebutan Ruang di Surabaya, 1900-1960an, 2011.

kota diisi dengan kisah perjuangan hidup sebagai kaum miskin kota.

Dalam konteks Kota Yogyakarta, khususnya Bong Suwung setidaknya ditemukan dua kosakata yang bisa menggambarkan bagaimana narasi pendudukan ruang kota berikut nalar yang mendasarinya. Di satu sisi, narasi pendudukan ruang kota merupakan kisah perjalanan mengenai bagaimana perjuangan kaum urban mengisi ruang urban dengan siasat dan strategi hidupnya. Di sisi yang lain, narasi pendudukan ruang kota merupakan kisah pengosongan demi pengosongan ruang kota yang diubah menjadi aset, modal dan berfungsi sebagai tempat. Kasus Bong Suwung jelas bagaimana rakyat miskin kota „menduduki” lahan yang kosong, sebuah lapangan di area pekuburan etnik Tionghoa, untuk „aktifitas perjudian, warung penjual makanan dan prostusi”. Mereka membangun sistem kehidupan baru di atas lahan yang dipandang “tidak bertuan” yang tidak biasa.

Sejarah sosial Bong Suwung ini menjadi satu penggalan kisah perjuangan hidup „kaum miskin kota“ dalam bertahan hidup menghadapi kerasnya persaingan, dan ketidakmampuan masuk dalam sistem struktur formal yang membutuhkan sebuah „lisensi“. Kaum miskin kota yang pendidikan relatif rendah, membangun usaha sendiri yang dapat bersaing dengan sektor formal sebagai langkah mekanisme keberlangsungan hidup.

Babat Alas

Narasi *babat alas* merupakan kisah pendudukan ruang kota sebagai ruang untuk bertahan hidup, menjadi bagian dan menyesuaikan diri dengan lingkungan perkotaan dan membentuk komunitasnya. Ruang kota merupakan kesempatan yang diperoleh dengan perjuangan dan digunakan untuk bertahan hidup di tengah kompleksitas sistemik ruang kota yang buas. Praktiknya dengan demikian seringkali mengabaikan batas-batas regulasi sekaligus batas-

batas kepemilikan ruang yang di tetapkan secara sepihak oleh penguasa kota. Narasi ini *babat alas* adalah proses dimana masyarakat melakukan perjuangan menemukan lokasi yang dipandang tidak banyak menarik perhatian elit seperti di tanah pekuburan, pinggir rel kereta api dan pinggir sungai dengan kontur tanah yang sulit, berupa perengan, atau masih becek, banyak dihuni nyamuk, ular dan binatang melata lainnya.

Perjuangan *babat alas* seperti dikisahkan oleh Pak Saridjan ini dilakukan oleh para pendatang yang tidak punya tanah di wilayah Bong Suwung.

Sekarang orang tampak salah kaprah menyebut lokalisasi liar di wilayah sekitar rel kereta api, juga menggunakan istilah *Bong Suwung* atau lebih dikenal dengan *Ngebong*. Aktivitas prostitusi di situ lebih tepat disebut *Ngeril*¹².

¹² Saridjan, *Op. cit*

Perjuangan yang dilakukan oleh kaum miskin kota dengan membangun gubuk-gubuk dari bambu, sebagai tempat tinggal maupun tempat „usaha”. Para pendatang ini membangun sentra ekonomi baru yang menciptakan sendi kehidupan kota dengan kehidupan remang-remangnya dan ekonomi informal yang masuk dalam kategori ekonomi informal yang “tidak sah”. *Babat alas* tidak saja dalam arti fisik akan tetapi juga sebuah gerakan membangun sistem kehidupan yang mampu mendatangkan keuntungan, menciptakan lapangan kerja „informal” yang tidak sah

atau „liar” menurut kategori formal yang diciptakan oleh penguasa.

Identitas baru komunitas yang dikembangkan oleh kaum pendatang miskin ini tidak saja menguntungkan mereka akan tetapi sesungguhnya juga menciptakan „mata rantai” ekonomi „ilegal” tempat dimana interaksi antara penguasa (baca: aparat keamanan dengan para pelaku (gali, bandar judi,

mucikari) dalam membangun simbiose mutualistis. Pada titik ini sebenarnya para pendatang (kaum miskin kota) ini mampu membangun narasi yang mampu bersaing dengan “narasi formal” yang dibangun oleh penguasa dengan pertumbuhan ekonomi formalnya. Tampaknya ini cukup mengkhawatirkan „penguasa” karena sesungguhnya mereka jika tidak dikendalikan akan mampu membangun kawasan sendiri yang mandiri, seperti yang terjadi di Lima Peru, dimana kaum pendatang miskin berjuang menciptakan kotanya sendiri, secara mandiri, dan akhirnya berhasil mendapatkan pengakuan „sah” sebagai bagian dari warga kota setelah melalui perjuangan yang panjang dan memakan banyak korban.

Narasi yang dibangun kaum miskin kota dalam kasus Bong Suwung ini menjadi „peluang” bagi orang-orang pengangguran dan minim ketrampilan untuk bisa bertahan hidup dan membangun sistem kehidupan yang lebih layak. Dinamika ini kemudian mendapatkan respon dari penguasa

dengan melakukan “pengosongan”, “pembersihan”, “penataan” bong Suwung dengan penggusuran secara fisik dan melakukan “pembersihan politis” dengan narasi kekuasaan (OPK). Lagi-lagi sebuah narasi elit dengan „melakukan kekerasan struktural” dengan alat-alat kekuasaan untuk menguatkan “otoritas keresmiannya” sebagai pemegang kuasa.

Bancakan

Narasi *bancakan* adalah kisah pendudukan ruang kota sebagai obyek, bahan, kapling, investasi, *asset*, dan modal. Ruang kota diubah menjadi tempat yang digunakan untuk menciptakan batas, mengontrol, menutup kesempatan terhadap keberadaan yang lain (proses marginalisasi) supaya bisa menjalankan fungsinya yang strategis sebagai lokasi dan meningkatkan nilai komoditasnya. Narasi *bancakan* merupakan narasi pengosongan ruang kota dalam arti yang sesungguhnya.

Selain diserbu oleh para pencipta dan pencari kerja, di satu sisi, ruang kota juga diserbu dengan jenis pendudukan yang memahami ruang kota sebagai obyek, bahan, dan modal. Misalnya, berdasarkan ingatan banyak orang di kampung, ketika tahun 70 – 80 an golongan elit Orde Baru yang terdiri dari tentara dan pegawai negeri berangsur-angsur mulai “memborong” tanah-tanah “kosong” di Yogyakarta ketika mereka diuntungkan oleh pembangunan.

“Tanah di bekas lahan Bong Suwung sejak akhir tahun 1970an dan berpuncak pada antara tahun 1982-1983 mulai diduduki justru oleh orang-orang kelas menengah yang mempunyai modal, terutama adalah keluarga Tentara dan keluarga pegawai PJKA. Istilahnya waktu itu yang berani mengkapling adalah orang-orang “nekat”. Kemudian pengurus RK punya inisiatif untuk melakukan pendataan dan orang yang mengkapling diharuskan membayar sejumlah uang. Saya tidak tahu apakah uang itu untuk pribadi pengurus RK atau sebagai uang kas kampung. Maka dalam waktu singkat lahan bekas Bong Suwung berubah menjadi perkampungan baru yang padat”¹³.

¹³ *Ibid.*

Praktik pengusuran Bong Badran sesungguhnya merupakan upaya “pengosongan” lahan atas nama “ketertiban dan keamanan” untuk kemudian diperebutkan dan dikuasai oleh komunitas kelas menengah yang memiliki modal, sementara kaum miskin kota hanya menjadi penonton. Mereka “dibersihkan dari rumah tinggal fisik, hingga penghidupannya, bahkan nyawanya juga hilang dalam kasus para gali yang masuk dalam “daftar bunuh” dari aparat keamanan. Sementara komunitas Bong Suwung, khususnya pekerja seks dan pemilik warung bersiasat, bergeser ke pinggiran, dengan membangun lapak-lapak baru di kanan-kiri jalur rel kereta api yang dibatasi oleh tembok yang dibangun oleh kolonial Belanda. Komunitas Bong Suwung menjadi tidak tampak dari luar, tetapi tetap „eksis“, tersembunyi di balik tembok, dan rumah-rumah penduduk, di bibir lintasan kereta api Jurusan Yogyakarta – Jakarta yang rawan dengan kecelakaan.

Narasi *bancakan* terhadap tanah-tanah “keistimewaan ini” ternyata tidak berhenti, khususnya ketika terjadi “kekosongan” hukum yang mengatur tentang hlm itu. Misalnya ketika masa sesudah krisis 98 mulai marak di media massa mengenai kasus pengkaplingan lahan-lahan kota oleh para pejabat dan mulai dipersoalkannya status tanah yang tidak jelas serta status Kota Yogyakarta sebagai daerah keistimewaan (misalnya kasus pengkaplingan tanah di Tungkak, Sorosutan, Jatimulyo, ataupun kasus pen-sertifikatan Hotel Ambarukmo atas nama Sultan HB X). Awal tahun 2000, Yogyakarta juga dilanda demam pembangunan mal-mal dan pengalih-fungsian ribuan hektar sawah, kebun dan tanah-tanah “terlantar” menjadi perumahan atau *real estate*.

Skala konflik ruang kota, yang berujung pada pengusuran sebagai pola dan alat penyelesaiannya, semakin meningkat dan semakin ditegaskan menjadi menu sehari-hari

wajah penataan kota-kota besar di Indonesia. Penggusuran bisa dilakukan oleh pihak manapun saja, bukan hanya oleh negara. Dilihat dari sudut pandang manapun, penggusuran merupakan wujud penggunaan kekerasan dalam konflik ruang kota. Ia merupakan puncak kekerasan yang dilakukan meski atas nama hukum, ketertiban, keindahan, dan kebersihan kota. Penggusuran mengingkari hlm paling dasar dari semua itu, yaitu: makna keberadaan manusia. Penggusuran merupakan potret ketika sebuah pihak menganggap lahan di kota sebagai “kosong”.

2. Siasat sebagai Komunitas

Andre Bayo Ala menyunting Lewis menyatakan masyarakat yang menganut kebudayaan kemiskinan memiliki rasa kehidupan kelompok yang relatif tinggi, sekurang-kurangnya memiliki suatu organisasi yang melebihi keluarga inti atau keluarga besar. Umumnya mereka menjadi anggota

kelompok-kelompok informal temporer, menjadi anggota-anggota geng-geng lingkungan yang lebih luas wilayahnya daripada luas wilayah kediamannya sehingga mencerminkan bahwa kaum gembel bukanlah sama sekali tidak memiliki organisasi¹⁴.

Setelah reformasi sejak tahun 2000, komunitas Bong Suwung mengalami perubahan secara perlahan dalam melakukan pengorganisasian sebagai komunitas, khususnya paguyuban pedagang dan paguyuban pekerja seks komersial. Sebelumnya, komunitas Bong Suwung meliputi dua komunitas itu, mereka tergantung dengan kepemimpinan tokoh “gali” yang berperan pelindung dalam sebuah organisasi kelompok geng (mafia). Keberadaan organisasi geng komunitas bong Suwung lebih untuk merespon faktor keamanan dari luar, khususnya operasi yang dilakukan oleh

¹⁴ Andre Bayo Ala (ed.), *Kemiskinan dan Strategi memerangi kemiskinan* (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm. 23.

aparat keamanan, tetapi belum ada paguyuban yang melakukan pemberdayaan untuk anggota-anggotanya dalam strategi menghadapi masalah yang lebih kompleks seperti soal kesehatan reproduksi, jaminan layanan kesehatan, dan pendidikan lainnya. Problem keseharian yang senantiasa dihadapi oleh mereka dari waktu ke waktu bersifat klasik berjalan seiring waktu dan senantiasa menghadapi kekuasaan struktural yang terus mencoba menggusur mereka, baik dari lokasi maupun cara hidup.

Perubahan paradigma pemerintahan setelah reformasi kiranya mempengaruhi cara pandang dan pemahaman tentang kenyataan bahwa komunitas Bong Suwung juga memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam berbagai aspek kehidupan, yang selama ini karena paradigma dan persepsi yang dibangun layanan-layanan untuk meningkatkan kesadaran, peningkatan ketrampilan dan pemberdayaan komunitas tidak berjalan. Keterlibatan kelompok eksternal seperti PKBI dan

Koalisi LSM perempuan yang aktif melakukan pendidikan informal komunitas terpinggirkan termasuk komunitas Bong Suwung dan kelompok marginal lain menjadi „jalan” perubahan dalam cara pandang baik di kalangan komunitas pinggiran yang menjadi

„korban dari struktural” karena pembangunan tidak menyentuh mereka. Tak pelak ini merupakan siasat politik untuk bertahan sesuai perkembangan jaman.

Kelompok Eksternal

Menurut seorang tokoh pekerja lapangan yang aktif sebagai penggerak di komunitas Bong Suwung sejak 1992, PKBI sebagai perkumpulan aktivis yang bergerak pada isu kesehatan reproduksi masuk ke komunitas bong Suwung dan Sarkem melakukan usaha-usaha pelayanan kesehatan kepada komunitas yang rentan seperti Pekerja Seks dan Waria yang banyak terdapat di Yogyakarta. Gerakan PKBI awalnya lebih

fokus pada aspek kesehatan reproduksi dan gerakan untuk kesadaran mencegah penyebaran penyakit menular seksual dan HIV-AIDS. PKBI memelopori pengembangan organisasi komunitas untuk kelompok WPS ini dengan Griya Lentera di Komunitas Sarkem dan Kemis Sehat sejak tahun 1993 untuk komunitas PS di Bong Suwung¹⁵. Melalui Kemis Sehat ini awalnya, berbagai macam kegiatan untuk penyuluhan kesehatan, perlindungan diri dalam kerja dari penyakit dan kekerasan ini kemudian berkembang kepada isu-isu yang lebih luas terkait dengan advokasi hak untuk mendapatkan perlakuan yang setara sebagai pekerja yang sama dengan jenis pekerjaan yang lain.

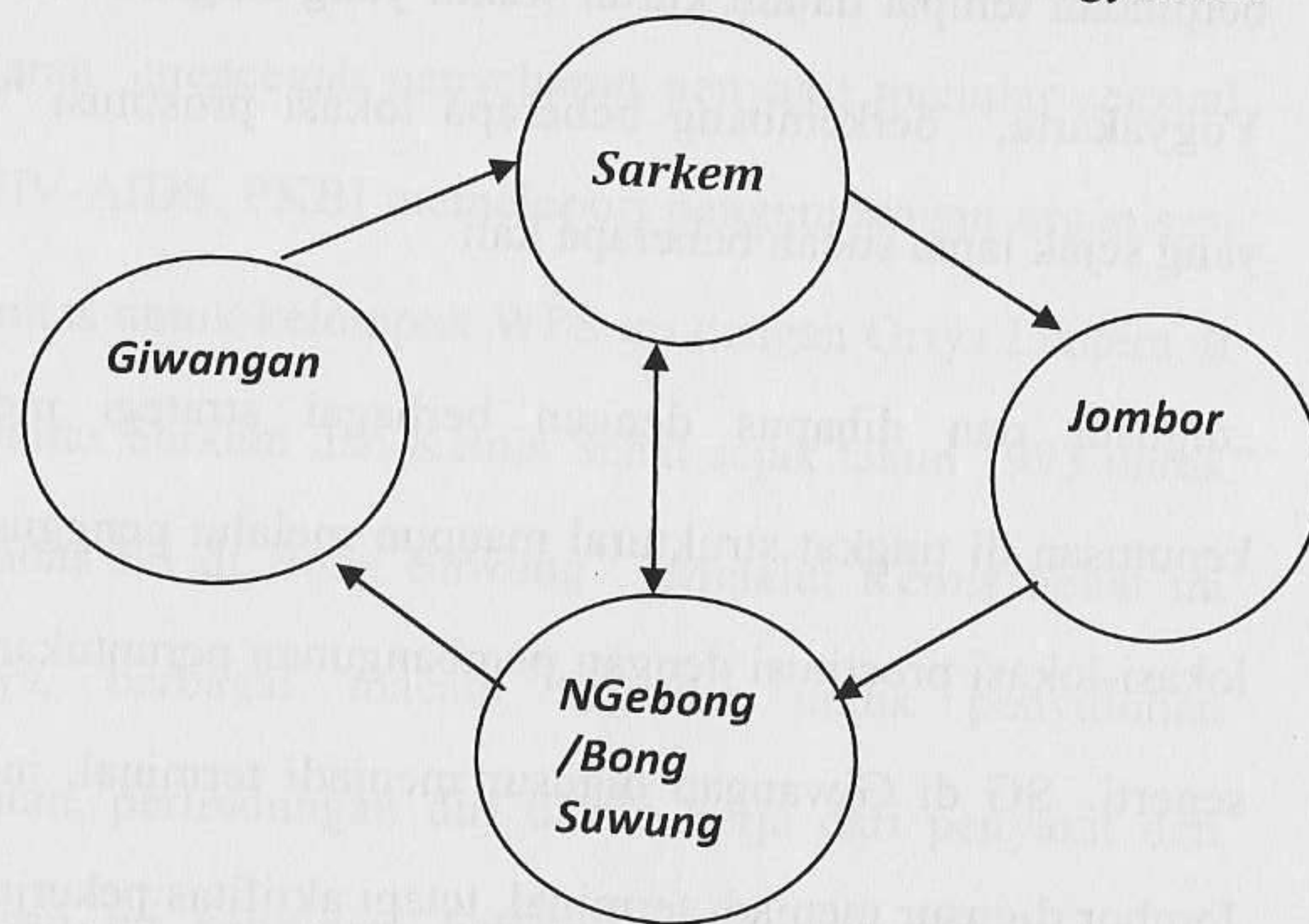
Membangun paradigma dan perubahan perilaku ini tidak mudah apalagi dengan komunitas yang dianggap “liar” dalam arti mobilitas komunitas yang tinggi, yang selalu

¹⁵ Wawancara, Raharjo (45 tahun), mantan aktifis PKBI tahun 1990an, April 2014.

berpindah tempat dalam kurun waktu yang singkat. Di kota Yogyakarta, berkembang beberapa lokasi prostitusi “liar” yang sejak lama sudah beberapa kali

„digusur dan dihapus dengan berbagai strategi melalui keputusan di tingkat struktural maupun melalui pengusuran lokasi-lokasi prostitusi dengan pembangunan peruntukan lain seperti SG di Giwangan digusur menjadi terminal, juga di Jombor digusur menjadi terminal, tetapi aktifitas pekerja seks tidak pernah mati.

Bagan 1. Jaringan lokasi Prostitusi di kota Yogyakarta

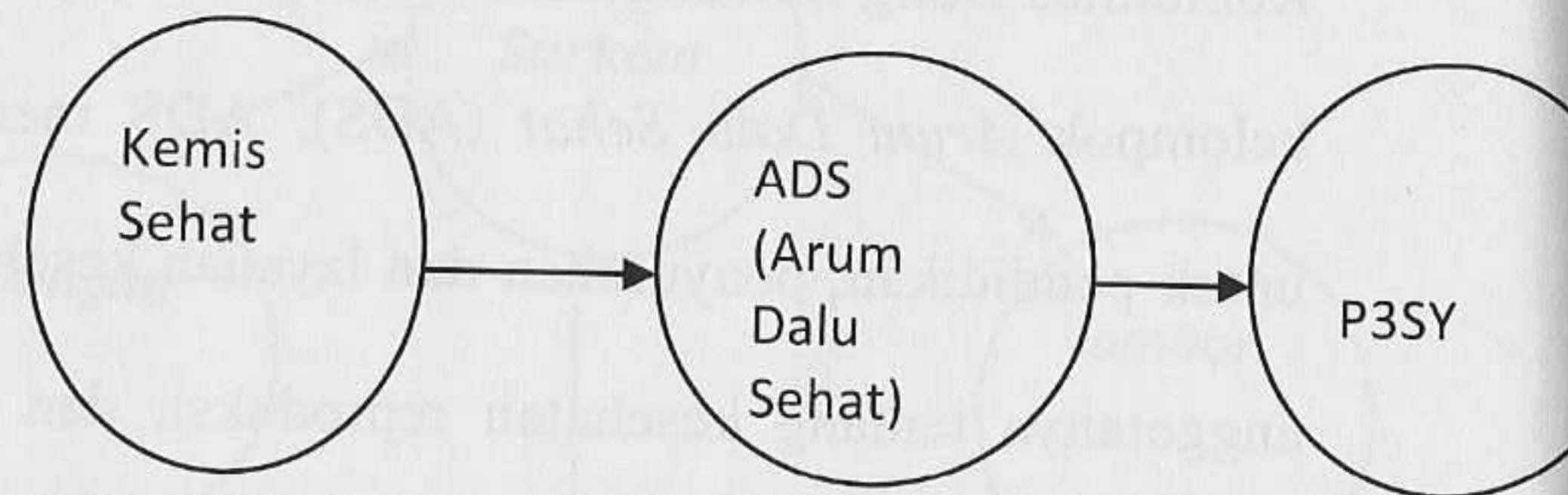


PKBI melakukan pengorganisasian hampir di semua lokasi prostitusi di kota Yogyakarta dan mengembangkan paguyuban sebagai wadah membangun jaringan antar komunitas “lokalisasi”. Di setiap komunitas lokalisasi tersebut dibentuk kelompok-kelompok arisan sebagai upaya untuk membangun ikatan komunitas. Dari kelompok-kelompok tersebut kemudian dikembangkan kegiatan jaringan bersama antara komunitas yang tergabung dalam Komunitas *Kemis Sehat* (KS). Pada tahun 2001, Kemis Sehat

bubar dan masing-masing bergerak sendiri. Sejak 2001, Komunitas Bong Suwung untuk pekerja seksnya membentuk kelompok *Arum Dalu Sehat* (ADS). ADS menjadi wadah untuk pendidikan, penyuluhan dan layanan kesehatan kepada anggotanya tentang kesehatan reproduksi, dan peningkatan kesadaran tentang seks yang aman misalnya wajib menggunakan kondom saat melakukan praktik sebagai cara untuk mengurangi resiko kerentanan penyakit menular seksual (IMS) maupun HIV-AIDS.

Sejak 2010, dengan fasilitasi dari PKBI, ada upaya untuk membentuk Jaringan Paguyuban Perempuan Pekerja Seks Yogyakarta (P3SY) sebagai wadah untuk memperjuangkan hak-hak Perempuan Pekerja Seks lebih solid.

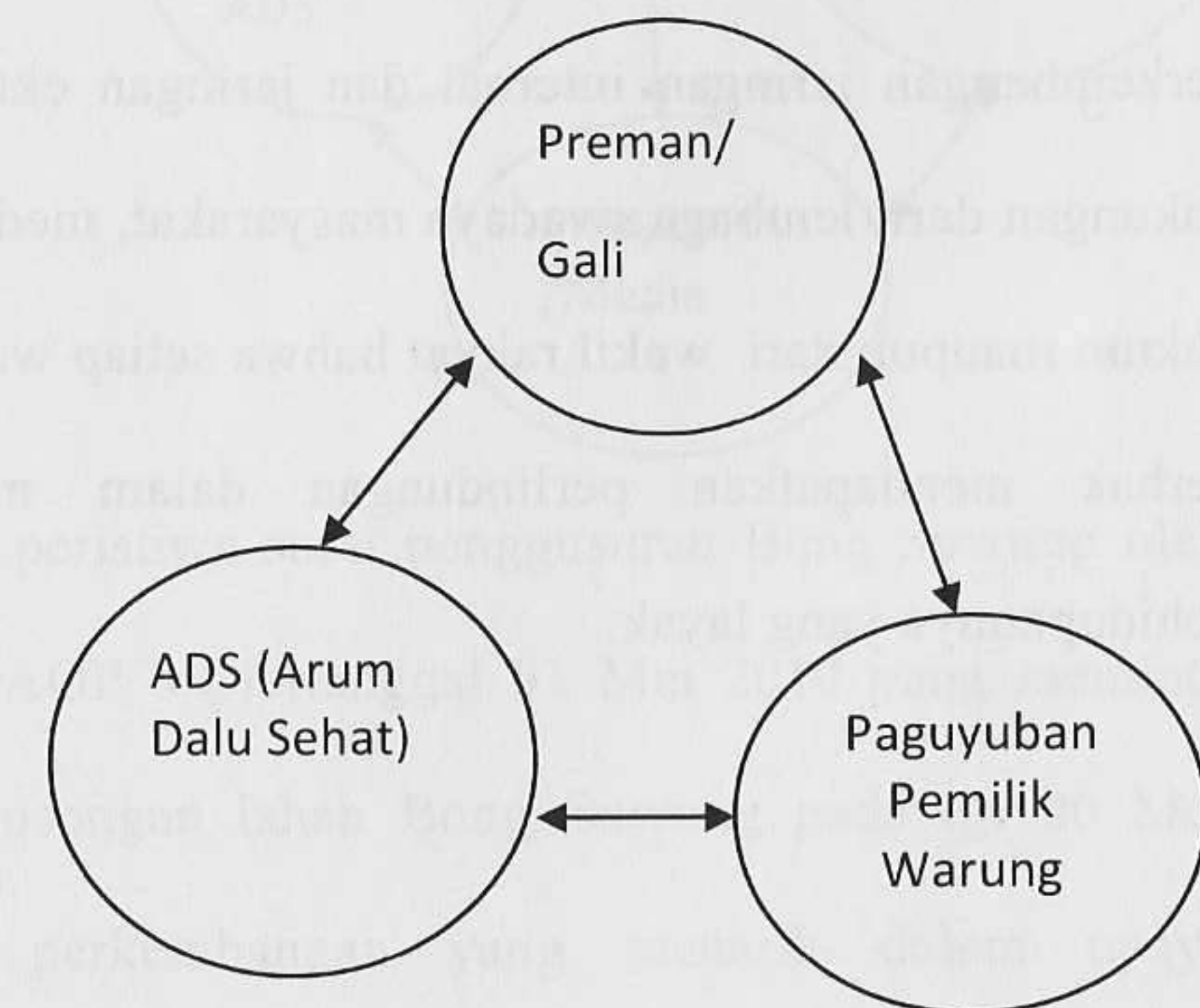
Bagan 2. Perkembangan Organisasi PPS Bong Suwung 1992 -2010



Secara perlahan peran pihak eksternal, khususnya dari LSM ini meningkatkan kesadaran pada komunitas pekerja seks untuk menguatkan komunitas mereka secara internal khususnya yang terkait dengan “perlindungan hak dan kesehatan reproduksi”. Keterlibatan pihak eksternal seiring dengan waktu juga menjadi mediator bagi komunitas pekerja seks untuk mendapatkan layanan-layanan kesehatan yang gratis dari pemerintah, jika mengalami „masalah kesehatan“. Kelompok eksternal ini secara aktif melakukan pendidikan dan advokasi untuk masyarakat, memperjuangkan kesetaraan pekerja seks sebagai profesi. Penguasa dan publik

secara umum bisa saja tetap memiliki imajinasi tersendiri dalam memandang komunitas pekerja seks seperti di Bong Suwung, tetapi kenyataan sosial tidak bisa dihapus demikian saja, karena sejarah mencatat bahwa keberadaan mereka turut mewarnai hiruk pikuk sebuah kota.

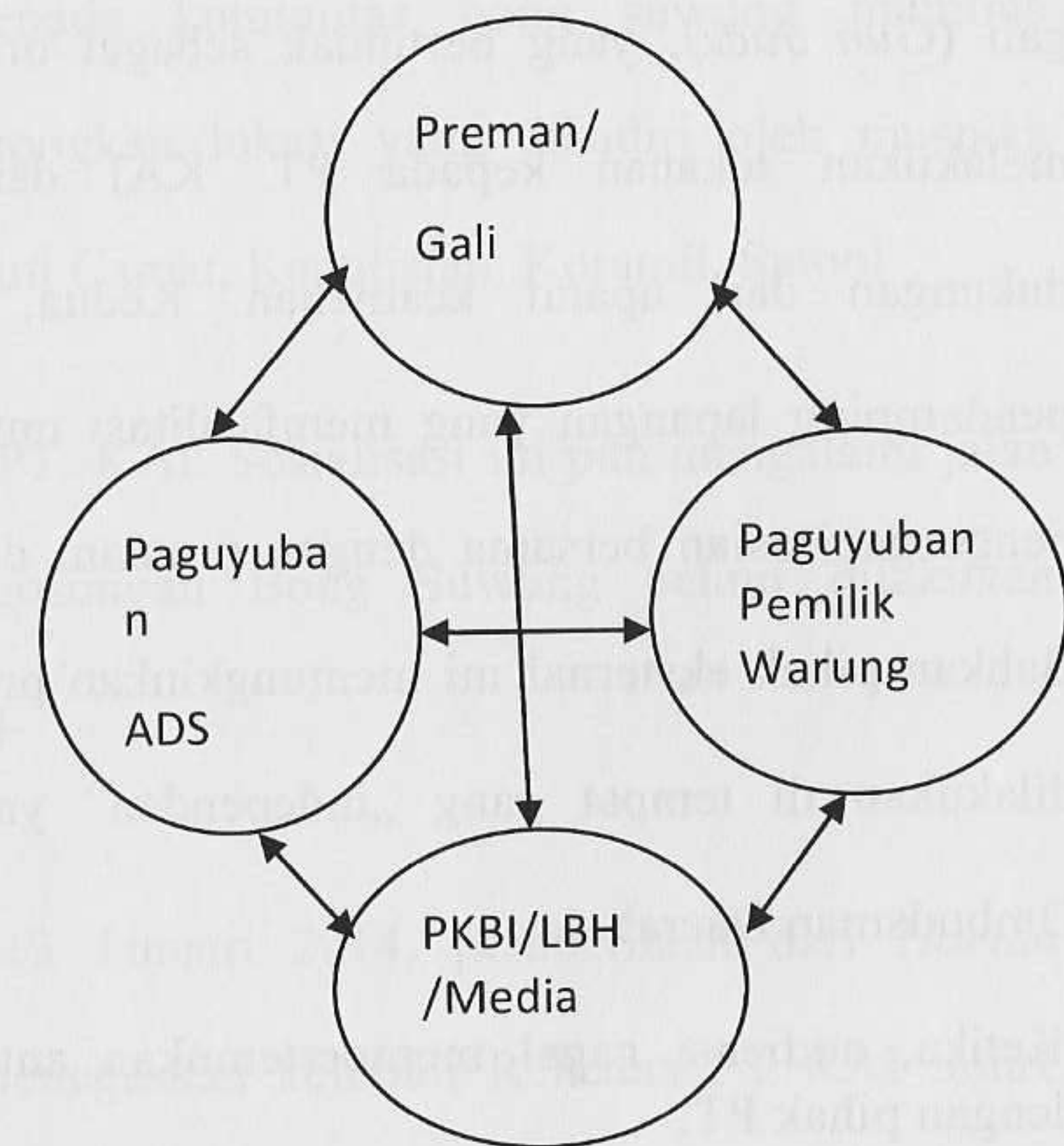
Bagan 3. Pola Hubungan Komunitas Bong Suwung sebelum reformasi



Pengorganisasian komunitas Bong Suwung ini semakin kuat ketika terjadi masalah penggusuran Bong Suwung, yang

sebelumnya tidak pernah dilakukan. Pembentukan kelompok lebih secara alami yang dibuat oleh komunitas sendiri untuk kepentingan-kepentingan dalam berhadapan dengan razia dan operasi dengan polisi jika tertangkap. Peran PKBI juga terbatas fokus pada isu-isu kesehatan belum mengarah ke proses litigasi dan advokasi lebih luas, termasuk kasus pengusuran terkini. Perkembangan strategi dalam melakukan advokasi ini semakin kuat seiring dengan perkembangan jaringan internal dan jaringan eksternal, baik dukungan dari lembaga swadaya masyarakat, media, bantuan hukum maupun dari wakil rakyat bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dalam menjalankan kehidupannya yang layak.

Bagan 4. Pola Hubungan Komunitas Bong Suwung Setelah Reformasi



Pada peristiwa surat pengusuran Bong Suwung oleh PT. KAI DAOP VI tertanggal 01 Mei 2010 yang meminta untuk pengosongan lahan Bong Suwung pada tgl 06 Mei 2010 ada perkembangan yang menarik dalam upaya melakukan dialog dengan PT KAI. Dalam proses bertahan, komunitas Bong Suwung menggalang dukungan dari

berbagai pihak. Ada beberapa pihak yang dilibatkan untuk memperjuangkan hak-hak komunitas Bong Suwung yakni, gali (*Gun Jack*), yang bertindak sebagai orang kuat yang melakukan tekanan kepada PT. KAI dan memastikan dukungan dari aparat keamanan. Kedua, PKBI selaku pendamping lapangan yang memfasilitasi untuk melakukan pengorganisasian bersama dengan preman, dan paguyuban. Bahkan pihak eksternal ini memungkinkan proses dialog itu dilakukan di tempat yang „independen” yakni di kantor Ombudsman Daerah.

Ketika, audiensi gagal mempertemukan antara komunitas dengan pihak PT.

KAI, mereka melakukan demonstrasi ke jalan, dan melakukan audiensi ke DPRD Propinsi DIY. Upaya komunitas Bong Suwung ini melakukan proses advokasi hingga ke DPRD ini berbuah karena pengusuran belum jadi dilakukan oleh pihak

PT. KAI hingga bulan Juli 2013, dimana PT. KAI melakukan pertemuan yang disebut

“sosialisasi” kepada komunitas bong suwung meminta mereka mengosongkan lokasi yang dihadiri oleh muspika setempat, meliputi Camat, Kepolisian, Koramil, Satpol

PP, dan pihak PT. KAI. Sosialisasi ini pun mengalami jalan buntu, dan pengosongan Bong Suwung belum dilakukan hingga sekarang.

Pada tanggal 13 Januari 2014, pemberitaan dari *Harian Tribun Jogja* menegaskan kembali Rencana PT KAI untuk melakukan Penataan Malioboro dengan prioritas Pengosongan Bong Suwung. Pemberitaan ini melibatkan penandatanganan

MOU Penataan Malioboro, yang diwakili oleh Pemkot Yogyakarta, Gubernur, dan PT. KAI DAOP VI¹⁶. Dengan

¹⁶ *Tribun Jogja*, 13 Januari 2014.

UU Keistimewaan No. 13 tahun 2012, yang memberikan kewenangan Gubernur untuk mengatur tata ruang atas tanah-tanah *Sultan Ground* kemungkinan akan semakin menjepit komunitas Bong Suwung untuk dapat bertahan, jika Sultan yang meminta mereka untuk pindah.

3. Siasat Politik sebagai Kampung

Komunitas Bong Suwung menurut peta administratif setelah reorganisasi tahun 1985, secara spasial masuk dalam dua wilayah Kecamatan, sebagian masuk

Wilayah Kecamatan Gedongtengen, sebagian masuk wilayah Kecamatan Jetis. Awalnya, yang disebut Bong Suwung konon adalah sebuah lahan kosong di antara tanah pekuburan secara spatial artinya posisinya sekarang ini digunakan sebagai

Gedung Kopertis, berada di jalan Tentara Rakyat Mataram (dulu jl. Soerodinan). Secara administratif terjadi perubahan, sebagian besar wilayah bong Suwung lama masuk wilayah Kampung Badran RT 38, RW 09. Secara administratif meski penduduk mengelak, sebagian dari komunitas Bong Suwung hingga sekarang ini yang aktif bertempat tinggal di RT 38, RW 09 (yang dulunya RT 01, RK Badran). Sebagai kampung administratif formal tidak ada hubungan dengan komunitas Bong Suwung kecuali warganya yang masuk sebagai warga yang memegang kartu identitas atau KTP Badran.

Sejarah sosial Komunitas Bong Suwung dipandang sebagai sumber masalah sosial kota yang dicitrakan sebagai “daerah hitam” pada tahun 1970-1980an. Tempat berkembangnya perilaku kehidupan yang menyimpang dari normalitas umum, berkembangnya lokalisasi, perjudian, dan

berbagai jenis pekerjaan yang lekat dengan kriminalitas seperti premanisme. Sekarang ini ada kesan kuat bahwa jika ditanya tentang kaitan antara komunitas Bong Suwung dengan kampung secara formal, ada kecenderungan orang menarik garis batas dengan pernyataan “kampung kami sekarang ini sedikit yang berprofesi dan bekerja di Bong Suwung, kebanyakan yang bekerja di Bong Suwung sekarang ini adalah pendatang. Kampung kami sudah berubah”¹⁷.

Pernyataaan ini menandakan bahwa sebuah pandangan standar moralitas tertentu telah terpatri dalam benak bahwa sejarah kampung yang dicitrakan “hitam telah mengalami perubahan”. Alasan yang acapkali digunakan juga adalah soal komunitas “Bong Suwung dipandang liar, karena tidak diakui secara resmi oleh negara”. Dengan alasan

¹⁷ Wawancara Ketua RT 38, RW 09 Pak Teten (62 tahun), 31 Desember 2013.

komunitas Bong Suwung tidak memiliki KTP setempat. Kebanyakan mereka berasal dari berbagai daerah di luar kota Yogyakarta.

Perubahan-perubahan Secara administratif sebagai kampung dapat ditelusur setelah kemerdekaan, Bong Suwung merupakan bagian dari wilayah RT 01 Rukun Kampung Badran yang masih bagian dari Bumijo. Dengan semakin banyaknya pendatang yang bermukim di Kampung Badran, kemudian Kampung Badran memisahkan diri, dan membentuk Rukun kampung (RK) sendiri pada tahun 1946. Orang pertama yang didaulat menjadi Kepala RK adalah R. Sumarto, bertanggungjawab mengurus segala urusan administratif. Peran R. Sumarto ini dalam perkembangannya tidak hanya mengurus soal administratif, akan tetapi juga menjadi penjaga keharmonisan rumah tangga, mediator

penyelesaian urusan utangpiutang, hingga memberikan perlindungan secara legalitas dalam sistem negara¹⁸.

Perubahan signifikan proses institusionalisasi dari kawasan kumuh sekitar tanah pekuburan etnis Tionghoa yang banyak diduduki oleh pendatang yang membangun gubuk-gubuk liar, yang disebut sebagai *Gedhek Mlengkung*. Bangunan “rumah-rumahan terbuat dari bahan bambu” yang semi permanen, dibangun seadanya sehingga menimbulkan pemandangan kumuh sebagai sebuah deretan hunian yang tidak teratur dan berserakan. Fungsi dari *Gedhek Mlengkung* ini juga sebagai ruang untuk prostitusi. Kondisi ini ditambah berkembangnya kegiatan *mo-limo* (*main, mendem, madon, maling dan madat*)

¹⁸ Jika dirunut yang menjabat Ketua RK Badran sejak terbentuknya RK tahun 1946 hingga perubahan menjadi RW sekitar tahun 1985, adalah R. Sumarto, Sumito, Sastro Suradi, Damari Santoso, Suroso Hadjono, dan Suharjo. Dua nama terakhir adalah orang-orang yang menjabat masing-masing 3 periode ketika perubahan-perubahan Bong Suwung dan kegiatannya cukup dinamis hingga upaya penggusuran Bong Badran, termasuk didalamnya Bong Suwung.

dalam keseharian sehingga kampung Badran dianggap oleh aparat menjadi ancaman keamanan kota¹⁹.

Melihat perkembangan lahan pekuburan cina yang kumuh, pihak pengelola dalam ingatan warga, dengan bantuan polisi dan tentara melakukan operasi dengan penangkapan orang-orang dan memporak-porandakan tempat (liar) tersebut, aparat juga melakukan pembakaran. Di Yogyakarta pada awal tahun 1970-an, aparat keamanan gencar melakukan operasi dan razia kaum gelandang dan pengemis yang kemudian ditempatkan dipanti-panti rehabilitasi dan penampungan yang berlokasi di beberapa tempat seperti di Tungkak dan Sidomulyo²⁰. Bong Badran mulai dibongkar antara tahun 1977-1985 sebagai tanda pengakuan secara

¹⁹ Kusen A.H, *Upaya Menghadirkan “Citra Lain” Dari Ledok Badran* (Yogyakarta: Jurnal Kampung, 2003), hlm. 39-45

²⁰ Penampungan kaum gelandangan untuk dibina di Tungkak dikenal dengan sebutan “Ciptomulyo-Gatitomo” yang beroperasi sejak tahun 1946 – 1976 yang kemudian menjadi kampung bagian Kampung Tungkak Mergangsan, lih. *Jurnal Kampung*, 2003.

administratif sekaligus penggusuran segala aktifitas ilegal yang berlangsung di dalamnya.

Pengakuan sah atas perubahan spasial dari Bong Badran menjadi kampung (kampungisasi) ini ditandai dengan pembagian kapling-kapling tanah untuk rumah penduduk maupun berbagai fasilitas perkantoran di bekas lahan pekuburan Cina yang dipindahkan (digusur), seperti di sepanjang jalan Tentara Rakyat Mataram, kemudian dibangun Perpustakaan Daerah, di atas lahan Bong Suwung dibangun Kantor Dispenda, Samsat, Ditlantas Polda DIY dan gedung Arsip Daerah, pada lahan sebelah utara dibangun gedung-gedung pemerintahan lain seperti Kantor BLH, Kantor

Pemberdayaan Perempuan Propinsi, Arsip Daerah, dan Universitas Janabadra, Stikes, Restoran, Gereja, Kantor DPD PDI, dan DPD PPP.

Sementara itu, sebagai bagian dari penataan spatial jalan Jetis yang melintasi yang lurus melintasi *teteg sepur* menuju Kampung Jlagran, Gedong Tengen dibelokkan ke barat membuat jalan tembus dibawah jembatan kereta api kemudian belok kanan membangun jalan baru yang tembus dengan Jl. HOS. Cokroaminoto. Sebagai bagian dari operasi besar penertiban kawasan hunian liar di Bong Suwung, kemudian dibangun kantor Kecamatan dan Koramil di sisi Timur bekas Jalan tembus

Jetis - Kampung Jlagran sebagai simbol “hadirnya negara” secara fisik.

Ketika terjadi proses institusionalisasi komunitas Bong Suwung dan kampung Badran pada tingkat pusat terdapat UU baru tentang reorganisasi RT dan RW. Pada waktu yang bersamaan secara administratif RK dihapuskan dan Bong

Suwung menjadi bagian dari Kampung Badran masuk ke wilayah Kelurahan Bumijo,

Kecamatan Jetis. Perubahan secara administratif dilakukan dari RK dibagi menjadi 4 RW tahun 1985. Perubahan kebijakan ini dengan memecah-mecah rukun kampung menjadi bagian lebih kecil ini sebagai bentuk dari upaya kontrol negara atas warga negara. Sistem RT/RW yang dikembangkan ini merupakan warisan dari konsep kontrol hierarki pembagian administrasi yang diciptakan pada zaman pejajahan Jepang yang disebut *Tonarigumi* (RT) yang terdiri dari 30 KK dan *Assazookai* (RW) yang terdiri atas beberapa RT²¹.

Proses institusionalisasi atau formalisasi kawasan Bong Suwung menjadi satu bagian yang sah secara administratif

²¹ Kurasawa, A. *Mobilisasi dan Kontrol Studi tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942 -1945* (Jakarta: Grassindo, 1983).

yang dilakukan oleh negara ini menggunakan pendekatan yang hierarkis dan otoritatif. Dalam waktu yang singkat setelah pengusuran Bong Cina, kawasan itu telah berubah menjadi permukiman yang cukup padat dengan kehadiran para pendatang yang baru. Di sisi lain, aktivitas di Bong Badran tidak dengan sendirinya hilang tetapi bergeser di sekitar wilayah stasiun, 500 meter ke barat di kanan-kini rel kereta api.

Konstruksi penguasa atas warganya tidak sepenuhnya berjalan mulus, karena aktivitas Bong Suwung tetap berjalan, dengan intensitas yang tidak kurang dari sebelumnya. Realitas sosial ini merupakan bentuk dari sebuah perlawanan kaum miskin kota dalam mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Sekeras apapun kebijakan penguasa jika tidak dibarengi dengan pembangunan kesadaran dan akses nyata untuk keberlangsungan hidup maka Bong Suwung akan tetap hidup dan selalu mencari celah untuk berlanjut, karena

perkaranya soal hidup dan atau mati, sebagai bagian dari strategi bertahan hidup untuk memenuhi kebutuhan subsistensi.

Penguasaan Bong Badran oleh negara jika dikaji lebih jauh pada dasarnya bukan semata-mata terkait dengan masalah kekumuhan, kemiskinan dan ketidakamanan. Bong Suwung merupakan sebuah narasi kontestasi konflik tentang penguasaan tanah di perkotaan. Ini tidak lepas dari keuntungan ekonomi nasional oleh *booming* minyak pada kurun waktu 1970-an, serta pulangnya ekspatriat. Munculnya kelas menengah dan atas baru ini, salah satunya menyebabkan kepemilikan tanah telah berpindah tangan menjadi milik jenderal dan keluarganya, pejabat tinggi negara, konglomerat, dan golongan kelas atas Indonesia²². *Booming* minyak ini meningkatkan kesejahteraan khususnya

²² Hans-Dieter Evers & Rudiger Korff, *Urbanisme di Asia Tenggara* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002), hlm. 296.

kelompok kelas menengah ke atas dan memunculkan masalah spekulasi tanah (*land speculation*) di perkotaan, maka meningkat pesat kebutuhan untuk melakukan pembangunan prasarana berupa jalan, perkantoran dan permukiman.

Di Kota Yogyakarta, tanah-tanah pekuburan menjadi yang “tidak bertuan” menjadi sasaran perebutan (konflik), lahan *bancakan* bagi orang-orang yang kecil, tetapi juga peluang bagi kelompok elit dan kelas menengah yang memiliki kapital. Bon(g) Suwung (*kebun/makam kosong*) yang belum ditempati ini merupakan peluang yang paling mungkin untuk diperebutkan sebagai *properti*. Logika ini tampaknya yang turut mendasari pembongkaran Bong Suwung Badran, bukan saja persoalan penyelesaian kekumuhan dan ketidakamanan semata, melainkan spekulasi akses tanah di kota. Demikian pula, proyek-proyek pembangunan Orde Baru secara eksplisit merujuk kepada hubungan antara kebersihan dan kemajuan yang teratur,

yang menandakan gagasan tentang kerapian yang harus dikomunikasikan kepada orang banyak yang tidak berpendidikan²³. Penataan wilayah dengan penggusuran merupakan bahasa rezim Orde Baru untuk mewujudkan politik penampakan yang menafsirkan modernitas dalam wujud “kerapian”.

C. Ke-tidak-hadiran Negara

Tumbal, barangkali kata ini, tepat untuk mensarikan narasi “kekalahan kaum miskin dan komunitas marginal”. Dalam kasus Bong Suwung sangat jelas, dari waktu ke waktu sejarah sosial mereka tidak pernah mengalami perubahan signifikan.

Mereka tetap „dilabeli sebagai komunitas liar“. Negara tidak pernah hadir di tengah-tengah mereka. Negara yang

²³ Henk Schulte Nordholt, *Kriminalitas, Modernitas, dan Identitas Dalam Sejarah Indonesia* (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 266

direpresentasikan dalam simbol, aparat keamanan berbaju loreng, atau pegawai pamong praja dengan dengan batik biru korprinya, dan seragam khaki-nya, tidak membuat rakyat miskin kota (komunitas Bong Suwung) merasa dihargai tetapi senantiasa “sebuah perintah untuk pergi” karena mereka adalah

“komunitas liar yang menjadi sumber masalah kota”. Nasib kaum miskin kota seperti digambarkan oleh Mangunwijaya seperti dalam lirik lagu pop ini.

“ Seperti aspal jalan Semanggi, oleh roda kota aku tergilas.
Tapi semua kuanggap sepi.
Dari bis Banteng, dari
pucuk Monas, Salam
angin ke lembah padi.
Sabarlah dik sampai semua lunas²⁴.

²⁴ YB. Mangunwijaya, *Tumbal Kumpulan Tulisan Tentang Kebudayaan, Perikemanusiaan dan Kemasyarakatan* (Yogyakarta: Benteng, 1994), hlm. 282-284.

Bait ini merupakan sebuah ekspresi untuk para pendatang ke kota yang berjuang bagi keluarganya yang tinggal di desa. Kondisi perubahan zaman

(industrialisasi) dengan semangat pembangunan yang digelorakan pada tahun 1980an, telah mendorong gelombang urbanisasi ke kota-kota besar. Sebuah sindirian yang tajam dari Mangunwijaya terhadap orang-orang kota yang menasehati orang desa supaya tidak pergi ke kota, dengan pidato retoriknya bahwa desa adalah kekuatan negara. Meninggalkan desa artinya memperlemah sendi ekonomi nasional.

“Jangan pingin jadi orang kota. Kota itu maksiat, dan disana kau belajar jadi bandit dan pelacur. Tetaplah suci murni di desa. Orang-orang desa yang membanjiri kota dianggap sebagai bencana nasional.”²⁵

²⁵ *Ibid.*

Komunitas Bong Suwung tampaknya dipersepsikan seperti penggambaran tersebut, sebuah konsekuensi dari banyaknya kaum pendatang kota yang tidak bisa tertampung dalam dunia formal. Meski sesungguhnya komunitas Bong Suwung menjadi pusat ekonomi yang dikembangkan oleh komunitas miskin kota dan kelompok yang memiliki keberanian untuk berbeda, mendapatkan sumber kehidupan yang lebih baik, lepas dari pandangan kaum moralis dan normatif.

Negara dalam ingatan para pelaku komunitas Bong Suwung tidak pernah „hadir“ ditengah-tengah mereka dalam kehidupan keseharian. Meski simbol-simbol kehadiran mereka terbangun megah seperti kantor koramil, kantor kecamatan dan kantor polsek. Negara “hadir” sebagai pencabut nyawa, pada momentum pengusuran dan peristiwa OPK.

Ternyata, dalam negara pasca kolonial masih mencerminkan dan mempraktikan tindakan-tindakan dan paradigma kolonial dalam mengontrol dan mengatur warganya. Komunitas Bong Suwung tidak pernah benar-benar menjadi warganegara, mereka adalah warga kelas dua, kelompok *sub-altern*, kelompok yang termarginalkan dalam sistem dan struktur formal negara. Meskipun demikian justru “kehadiran “ mereka dalam dinamika kehidupan kota diperhitungkan oleh Negara.

Negara justru yang selalu kewalahan dalam „mengontrol” dan “menjinakkan” komunitas miskin kota dengan represi penguasa. Istilah menarik dari komunitas pinggiran Bong Suwung ketika menghadapi situasi sulit yang mengancam sumber penghidupan atau menyangkut persoalan perut adalah bagi *wong ngelih* (orang lapar), maka apapun bisa mungkin. Mereka terus melawan dengan segala cara untuk mempertahankan sumber penghidupannya, meski mereka

mahfum akan mengalami kekalahan ketika berhadapan dengan penguasa. Sejarah sosial komunitas Bong Suwung adalah sejarahnya orang lapar yang terserak dan mencoba bertahan di perkotaan dengan bersiasat dan membangun strategi negosiasi „lentur” dengan memanfaatkan celah-celah „aliansi semu” yang bertumbuh dalam perkembangan ekonomi bawah tanah seturut dengan perubahan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Arwan Tuti Artha, 2000. *Yogyakarta Tempoe Doeloe*. Yogyakarta: Bigraf Publishing.
- Aspinall, Edward, Gerry Van Klinken, eds., *The State and Illegality in Indonesia. Verhandeligen van het Koninklijk Instituut Voor Taal-, Land-, en Volkenkunde no. 269* (Leiden: KITLV Press, 2011)
- Bayo Ala, Andre (ed). 1981. *Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Burke, Peter 2005. *History and Social Theory*. USA: Polity Press.
- Bambang, Purwanto 2006. *Gagalnya Historiografi Indonesia Sentris!*. Yogyakarta: Ombak.
- Darwis Khudori, 2002. *Memuju Kampung Pemerdekaan Membangun Masyarakat Sipil dari Akar-akarnya Belajar dari Romo Mangun di Pinggir Kali Code*. Yogyakarta: Yayasan Pondok Rakyat
- De Soto, Hernando, 'Pertumbuhan Ekonomi Bawah Tanah di Peru', *Prisma* 5, Mei 1981
- Evers, Hans Dieter dan Korff, Rudiger, 2002. *Urbanisme di Asia Tenggara*, Jakarta: Penerbit Obor.
- _____, Ekonomi Bayangan, Produksi Subisten dan Sektor Informal. Kegiatan Ekonomi di Luar Jangkauan Pasar dan Negara. *Prisma* 5, Mei 1991:22-30
- Djenens, Msc. eds., 1985. *Perkampungan Di Perkotaan sebagai Wujud Proses Adaptasi Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Inventarisasi dan dokumentasi Kebudayaan Daerah)
- Denis, Lombard, 2005. *Nusa Jawa: Silang Budaya*. Jilid I – III. Jakarta: Gramedia.
- Guiness, Patrick, 1986. *Harmony and Hierarchy in a Javanese Kampung*. Singapore and New York : Oxford University Press.
- _____, 'Lima Keluarga Penggali Pasir di Yogyakarta', *Prisma* 5, Mei 1977.
- Hareven, Tamara dalam Ben Highmore eds., 2002. *The Everyday life Reader*. New York: Routledge

- Houben, Vincent J.H., 1994. *Keraton dan Kompeni, Surakarta dan Yogyakarta 1830-1870*. Leiden: KITLV Press.
- Jellinek, Lea, 1994. *Seperti Roda Berputar: Perubahan Sosial Sebuah Kampung di Jakarta*. Jakarta: LP3ES.
- Jellinek, L., Susiladiharti, dkk. 2002 *My Neighbour Your Neighbour: Governance, poverty and civic engagement in five Jakarta communities*. Jakarta: Laporan penelitian DFID (Departemen Pembangunan Internasional).
- Kementrian Penerangan, 1953. *Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Kementrian Penerangan.
- Kusen A.H, 2003. Upaya Menghadirkan "Citra Lain" Dari Ledok Badran. Yogyakarta: *Jurnal Kampung*. Edisi 1
- _____, 2004. Konstruksi Penguasa dan Siasat Kaum Urban. Studi kasus Ledhok Badran, kelurahan Bumijo, Kecamatan Jetis, Kotamadya Yogyakarta. Yogyakarta: *Skripsi S1 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada*.
- Kurasawa, A. 1994. *Mobilisasi dan Kontrol Studi tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942-1945*. Jakarta: Grassindo.
- Lee, E.S., 1976. *Suatu Teori Migrasi*. Yogyakarta: Lembaga Kependudukan UGM.
- Mansur Fakhrih, *Analisa Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Bentang, 1996).
- Mujiyono, 2005. *Sarkem Reproduksi Sosial Pelacuran Yogyakarta*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Murray, J. Allison, 1994. *Pedagang Jalanan dan Pelacur Jakarta Sebuah Kajian Anthropologi Sosial*. Jakarta: LP3 ES.
- Mustofa W. Hasyim, 2005. *Kali Code Pesan-pesan Api*. Yogyakarta: Yayasan Pondok Rakyat.
- Muhammad Zamzam Fauzanafi, 'Sejarah dan Institusionalisasi Kampung Tungkak'. *Jurnal Kampung Edisi 1*, 2003.
- Nordholt, Henk Schulte, Bambang Purwanto dan Ratna, Saptari, 2008. *Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia*. Jakarta: YOI dan KITLV, Bali: Pustaka Larasan.
- Nordholt, Henk Schulte, 2002. *Kriminalitas, Modernitas, dan Identitas Dalam Sejarah Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Purnawan Basundoro, Orang Miskin dan Perebutan Ruang Kota Surabaya, 1900-1960an. *Disertasi S-3 Studi Ilmu Humaniora*, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, 2011.
- NN., Penoendjock Jalan Kereta Api D.K.A.R.I. (Djawatan Kereta Api Indonesia), 1947
- Ramadhan KH, 1986. *Novel Royan Revolusi*. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Ricklef, M.C., 2002. *Yogyakarta di Bawah Sultan Mangkubumi, 1749-1792. Sejarah Pembagian Jawa*. Yogyakarta: Mata Bangsa.
- Roufer, G.F., 1931. Vorstenlanden ("Kerajaan-Kerajaan"). *AdatRechtbundel XXXIV*, Seri D. No.1
- Ryters, Lorens 1998. Pemuda Pancasila: The Last Loyalist Free Man of Soeharto's New Order. *Indonesia*. vol 66.
- Sartono Kartodirjo, 1992. Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah, Jakarta: PT. Gramedia.
- Sudomo Bandjarasari, 1952. *Sejarah Pemerintah Kota Yogyakarta*. Jogjakarta: Djawatan Penerangan Kota Jogjakarta.
- Sullivan, John, 1992. *Local Government and Community in Java, an Urban Case-Study*, New York: Oxford University Press.
- Singarimbun, Masri, 2003. *Reflections From Yogya Protraits of Indonesian Social life* (Yogyakarta: Penerbit Galang)
- Spivak, Gayatri C., *Can Subaltern Speak?* dalam C. Nelson and L. Grossberg (eds.), 1988. *Marxism and The Interpretation of Culture*. Macmillan Education: Basingstoke.
- Sukri, A. Im'an, Sukmono, Cahyadi Joko dkk., 2002. *Masa Depan Yogyakarta Dalam Bingkai Keistimewaan*. Yogyakarta: Parwi foundation.
- Selo Sumardjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. Depok: Komunitas Bambu, 2009 (Terjemahan, cet. Kedua)
- Soegeng Sarjadi, 1994. *Kaum Pinggiran Kelas Menengah Quo Vadis?* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Sullivan, John. 1992. *Local Government and Urban Community in Java an Urban Case Study*. Singapore, Oxford, New York: Oxford University Press.
- Tadjuddin Noer Effendi, 1983. *Masyarakat Hunian Liar di Kota: Sebuah Studi Kasus di Wonosito, Kotamadya Yogyakarta*. Yogyakarta: Pusat Penelitian, dan Studi Kependudukan, UGM.

_____, 'Permukiman Kumuh: Gejala dan Alternatif Kebijakan',
Kompas, 10 Juli 1987

Takashi Siraishi, 1997. *Zaman Bergerak Radikalisme Rakyat di Jawa, 1912-1926*.
Jakarta: Grafiti Press.

Taylor, J.L., 1972. Kampung-kampung miskin dan pengelompokan penghuni liar
di kota-kota Asia Tenggara, *Prisma*, no. 7, :75-84

Tri Nugroho, H. 2005. Kali, Ruang Kota, dan Siasat, *Jurnal Kampung Menulis
Kota*, Edisi 3, Yayasan Pondok Rakyat.

Van Klinken, Gerry, 1999. *What Caused The Ambon Violence*. Canberra :Inside
Indonesia

Yuyu. A.N, Krisna, 1981. *Menyusuri Remang-Remang Jakarta*. Jakarta: Sinar
Harapan.

YB. Mangunwijaya 1994 *Tumbal Kumpulan Tulisan Tentang Kebudayaan ,
Perikemanusiaan dan Kemasyarakatan*. Yogyakarta: Bentang.

WAWANCARA

Wawancara Angga (27 Th), aktifis PKBI, 10 November 2013.

Wawancara Yayuk (59 tahun), Mantan Pekerja Seks 18 dan 21 November 2013.

Wawancara Kuncung (40 tahun), tukang parkir Bong Suwung, 18 Nov 2013.

Wawancara dengan Ketua RT 38, RW 09 Pak Teten (62 tahun), 31 Des 2013.

Wawancara dengan Sariman, Ketua RT 48, RW 11, Ledhok Badran, 20
November 2013.

Wawancara, Saridjan (65 tahun), Penasehat Kotikam, 5 Januari 2014.

Wawancara Heriyanto (58 tahun), Satpam Universitas Janabadra, 10 Januari 2013.

Wawancara Ikin (58 th), Eks Bandar Judi, 31 Desember 2013.

Wawancara Raharjo, Aktifis PKBI tahun 1990an, 25 Maret 2014

Wawancara Supri (63 th), Pedagang Badran, 14 Maret 2014.

Wawancara Sutris (32 th), Eks Pengikut Gun Jack, 23 Juni 2014

SENSUS

Sensus Penduduk 1961, Penduduk Desa Jawa, Buku II Propinsi Jawa Tengah DI
Yogyakarta seri laporan no. 23, BPS dan Pusat Penelitian dan Studi
Kependudukan UGM.

Biro Pusat Statistik DIY, Penduduk Yogyakarta dalam Angka 1980.

*Volkstelling 1930, Deel II Inheemsche Bevolking van Midden Java en
Vorstenlanden*

PETA

Peta kolonial, koleksi dari Tropen -n Museum Institute, Amsterdam, 1925 diakses
di Museum Sonobudoyo, Yogyakarta.

KORAN

Harian Kedauletatan Rakyat, 25 Maret 1983.

Harian Kedauletatan Rakyat, 25 April 1983.

Harian Kedauletatan Rakyat, 6 Mei 1983.

Harian Kedauletatan Rakyat, 25 Maret 1985

Kompas, 10 Juli 1987

Kedauletatan Rakyat, 16 Juli 2013.

Tempo, 31 Juli 2012.

Jurnal Kampung, Kampung Menulis Kota, edisi 1 (2003)

Tribun Jogja, 13 Januari 2014.

Solo Pos Online, PT KAI Tolak Beri Ganti Rugi. Kamis, 27 Mei 2010.

Tempo.co Sabtu, 20 April 2013

.[http://www.tempo.co/read/news/2013/04/20/078474689/Gun-Jack-Legenda-](http://www.tempo.co/read/news/2013/04/20/078474689/Gun-Jack-Legenda-Preman-dari-Kampung-Badran)

Preman-dari-Kampung-Badran.

MAKALAH

Tadjuddin Noer Effendi, Masalah Ketenagakerjaan di Pedesaan dan Strategi Penanganannya, Makalah Seminar Peranan Lembaga-Lembaga Swasta dalam Pembangunan Desa di Yogyakarta, 26-28 Oktober 1983, Arsip PSKK, VF 108 (6)

_____, Sektor Informal antara Konsep dan Realitas, Arsip PSKK, VF 108 (3)

_____, Pola Mobilitas Pekerjaan Penduduk Kota :Studi Kasus di Diraprajan Yogyakarta, Arsip PSKK VF 108 (2)

Yoshie Fajar Kresno Murtri, 'Lahan Kosong Wacana Elitis Pendudukan dan Eksploitasi Ruang Urban', IVAA, (2012).